

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BOGOR MENURUT PENGELUARAN

2019-2023



Katalog: 9302023.3271

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BOGOR
MENURUT PENGELUARAN**

2019-2023

<https://bogorkota.bpt.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BOGOR**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA BOGOR MENURUT PENGELUARAN 2019-2023

ISSN :
Nomor Publikasi : 32710.24003
Katalog : 9302023.3271

Ukuran Buku: 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman: xii + 83 halaman

Naskah:
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Bogor

Penyunting:
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Bogor

Desain Kover:
Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Bogor

Diterbitkan oleh:
© Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Dicetak oleh:
Badan Pusat Statistik Kota Bogor

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat statistik

Tim Penyusun

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KOTA BOGOR
MENURUT PENGELUARAN 2019-2023**

Penanggung Jawab Umum:

Ir. Raden Gandari Adianti Aju Fatimah, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Asriana Ariyanti, MIDEc.

Penulis:

Nugrohoning G, SST.
Asriana Ariyanti, MIDEc.

Pengolah Data:

Nugrohoning G, SST.
Supriyadi, SE.
Siti Fahriah, SST.

Penyunting:

Dahliani, SE, M.M.

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, April 2024

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Bogor



Raden Gandari Adianti Aju Fatimah

<https://bogorkota.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	7
BAB II. METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT)	15
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga NonProfit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT)	18
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	20
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23
2.5. Perubahan Inventori (PI)	26
2.6. Ekspor Impor	30
BAB III. TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BOGOR MENURUT PDRB	
PENGELUARAN TAHUN 2019-2023	33
3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN	35
3.2. PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN	43
3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga	43
3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT	48
3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah	49
3.2.4. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	52

	Halaman
3.2.5 Perkembangan Perubahan Inventori	54
3.2.6 Perkembangan Net Ekspor/Impor.....	55
BAB IV. PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KOTA BOGOR	58
4.1. PDRB (Nominal).....	60
4.2. Kontribusi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	62
4.3. <i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	63
BAB V. PENUTUP	67
LAMPIRAN	71
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (miliar rupiah)	35
Tabel 2	PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (miliar rupiah).....	37
Tabel 3	Distribusi PDRB Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023	40
Tabel 4	Indeks Implisit PDRB Kota Bogor Menurut Pengeluaran, 2019 - 2023	42
Tabel 5	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Bogor, 2019-2023	44
Tabel 6	Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Bogor, 2019-2023	47
Tabel 7	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bogor, 2019-2023.....	48
Tabel 8	Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Bogor, 2019-2023	49
Tabel 9	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Bogor, 2019-2023.....	50
Tabel 10	Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Bogor, 2019-2023	53
Tabel 11	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Bogor, 2019-2023	55
Tabel 12	Perkembangan Net Ekspor Impor Kota Bogor, 2019-2023.....	57
Tabel 13	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Bogor, 2019-2023	61

Tabel 14 Kontribusi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Bogor, 2019-2023..... 63

Tabel 15 *Incremental Capital Output Ratio* Kota Bogor, 2019-2023 64

<https://bogorkota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023	36
Gambar 2 Distribusi PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2019-2023.....	38
Gambar 3 Perbandingan PDRB Kota Bogor Atas dasar harga berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2019 - 2023	39
Gambar 4 Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bogor, 2019-2023	41
Gambar 5 Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bogor, 2023	46

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Juta Rupiah).....	73
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Juta Rupiah).....	74
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen).....	75
Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen).....	76
Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen).....	77
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluara, 2019-2023 (persen).....	78
Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023.....	79
Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023.....	80
Lampiran 9. Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor (2010=100) Menurut Pengeluaran, 2019-2023.....	81
Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor (2010=100) Menurut Pengeluaran, 2019- 2023 (persen).....	82

<https://bogorkota.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://bogorkota.bps.go.id>

<https://bogorkota.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metode pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metode dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai

3.-Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik

-Disebut sebagai pendekatan “riil”

-Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

“**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sebagai berikut:

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	=	PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	=	Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	=	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	=	Perubahan Inventori
X	=	Ekspor
M	=	Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam

bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto”.

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data tersebut tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS kabupaten/kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga

konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan

rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;

- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*). R&D merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti R&D tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). MEE merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer *software* (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metode FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metode ini menggantikan metode *Imputed Bank Services Charge* (IBSC).
 - Valuasi
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau

jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://bogorkota.bps.go.id>

<https://bogorkota.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik

⁵Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif lebih rendah

3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)

- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut :

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan Atas Dasar Harga Berlaku (Atas Dasar Harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT Atas Dasar Harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT dan SERUTI.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output nonpasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran

LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metode sebagai berikut :

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga

- kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan Atas Dasar Harga Berlaku (Atas Dasar Harga Berlaku);
 5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
 6. Nilai PK-LNPRT Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen,

pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metode:

$$\begin{aligned} \text{PK-P Atas Dasar Harga Berlaku} = & \text{Output} - \\ & \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ & \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ & \text{Output Bank Indonesia} \end{aligned}$$

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

Output nonpasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan PK-P Atas Dasar Harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P Atas Dasar Harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait

dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yaitu dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat

- tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
- 2 Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
 - 3 Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.
- l. Survei Penyusunan Disagregasi PMTB

v Metode estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

- ✓ Metode Langsung:

PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB Atas Dasar Harga Konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB Atas Dasar Harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metode Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB Atas Dasar Harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : PMTB Atas Dasar Harga Konstan (t) = PMTB atas dasar harga (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang

terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena

menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumah tangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalan BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjenak Kementan.

v Metode Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metode revaluasi atau metode deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metode Revaluasi

Metode ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

$$\text{PI Atas Dasar Harga Berlaku} = \text{Volume Inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)} \times \text{Harga per unit}$$
$$\text{PI Atas Dasar Harga Konstan} = \text{PI Atas Dasar Harga Berlaku} / \text{IHPB}$$

b. Metode Deflasi

Metode ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

$$\text{PI Atas Dasar Harga Konstan} = \frac{\text{Inventori (t) Atas Dasar Harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) Atas Dasar Harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$$

$$\text{PI Atas Dasar Harga Berlaku} = \text{PI Atas Dasar Harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$$

2.6 EKSPOR-IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan nonresiden (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metode tidak langsung.

<https://bogorkota.bps.go.id>

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA BOGOR
MENURUT PDRB PENGELUARAN
2019-2023

<https://bogorkota.bps.go.id>

<https://bogorkota.bps.go.id>

3.1. PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sejak tahun 2015 PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya penyesuaian untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru yaitu SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Tabel 1 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	45.582,47	45.013,83	47.301,11	52.212,39	56.362,06
2 Konsumsi LNPR	790,72	765,21	788,75	860,78	958,04
3 Konsumsi Pemerintah	4.972,04	4.952,12	4.943,91	4.996,68	5.521,01
4 PMTB	15.722,78	14.605,10	16.435,04	17.441,68	19.739,33
5 Perubahan Inventori	2.135,03	855,79	-529,40	-18,40	7,44
6 Net (Expor Impor)	(23.005,29)	(20.280,18)	(20.613,76)	(22.578,53)	(25.584,13)
TOTAL PDRB	46.197,76	45.911,86	48.325,64	52.914,60	57.003,76

* Angka sementara

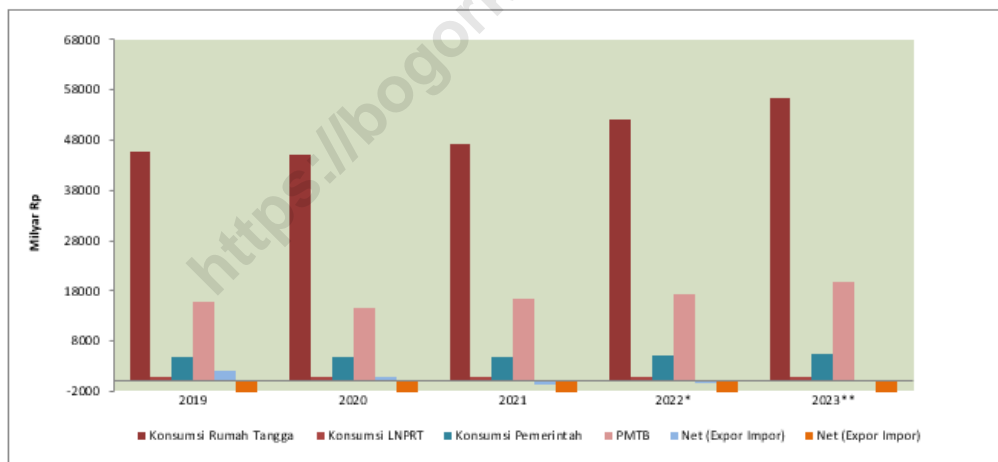
** Angka sangat sementara

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Kota Bogor. Peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga yang harus dibayarkan serta peningkatan volume pada setiap komponen PDRB.

Kondisi PDRB menurut komponen pengeluaran Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku pada periode 2019-2023 ditampilkan pada Tabel 1. Pada tahun

2020 nilai PDRB mengalami penurunan -285,9 miliar rupiah yang disebabkan karena turunnya volume pada setiap komponen dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 dan 2022 Nilai PDRB mulai meningkat dengan hingga mencapai nilai 48.325,64 miliar rupiah dan 52.914,60 miliar rupiah, seiring dengan dilaksanakannya program-program pemerintah untuk pemulihan perekonomian paska pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, nilai PDRB Kota Bogor meningkat cukup signifikan, hingga mencapai nilai 57.003,76 miliar rupiah. Peningkatan tersebut disebabkan tidak hanya karena adanya pengaruh perubahan harga, namun juga karena adanya perubahan volume.

Gambar 1 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023



Pada Tahun 2023, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan sebesar 4.089,16 miliar Rupiah. Gambar 1 menunjukkan bahwa hampir semua komponen yang terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Secara umum, konsumsi rumah tangga memiliki nilai terbesar dibandingkan dengan komponen lainnya.

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 yaitu atas dasar harga dari berbagai

jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. PDRB pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Bogor pada periode 2019-2023 dapat ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2 PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	30.750,83	29.733,52	30.659,69	32.438,61	33.546,74
2 Konsumsi LNPRT	582,55	552,89	563,21	589,91	626,92
3 Konsumsi Pemerintah	3.181,39	3.094,63	3.011,38	2.983,11	3.274,02
4 PMTB	11.293,06	10.482,87	11.113,12	11.316,17	12.381,00
5 Perubahan Inventori	1.299,59	519,63	-300,58	-10,40	4,05
6 Net (Expor Impor)	-14.811,69	-12.220,79	-11.674,35	-12.058,53	-12.777,35
TOTAL PDRB	32.295,73	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36

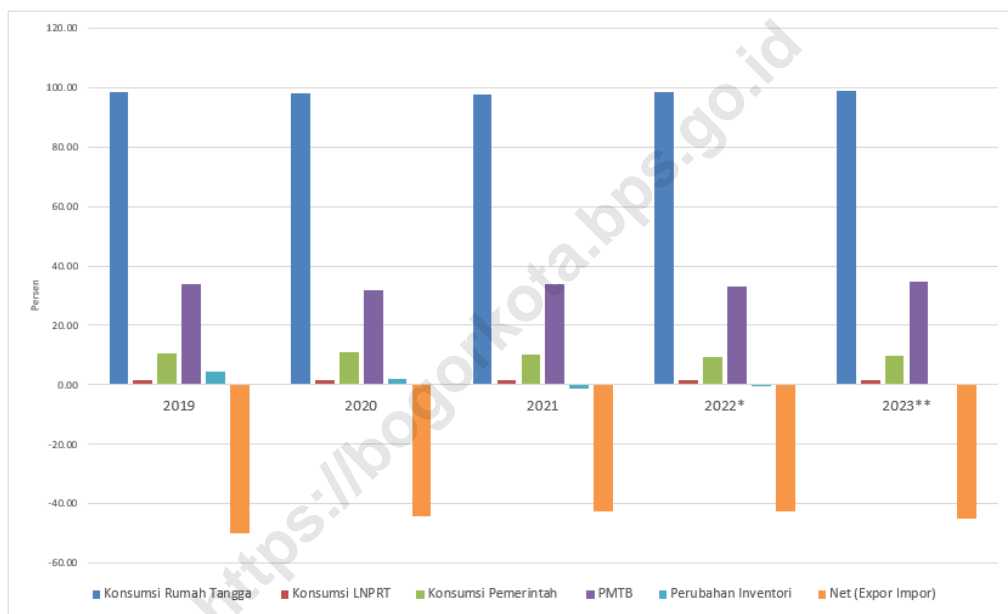
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Jika nilai perubahan PDRB atas dasar harga berlaku disebabkan oleh perubahan harga dan perubahan volume, maka PDRB atas dasar harga konstan hanya dipengaruhi oleh perubahan volume tanpa adanya pengaruh perubahan harga. Dari Tabel 2, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kota Bogor mengalami penurunan sebesar 132,99. Turunnya nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan disebabkan karena Pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya volume dari semua komponen PDRB pengeluaran. Nilai PDRB meningkat mencapai 33.372,48

miliar rupiah pada tahun 2021 menandakan adanya keberhasilan dari program pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 di Kota Bogor. Pada tahun 2022 dan 2023 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Bogor terus meningkat hingga mencapai 35.258,87 dan 37.055,36 miliar rupiah.

Gambar 2 Distribusi PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2019-2023

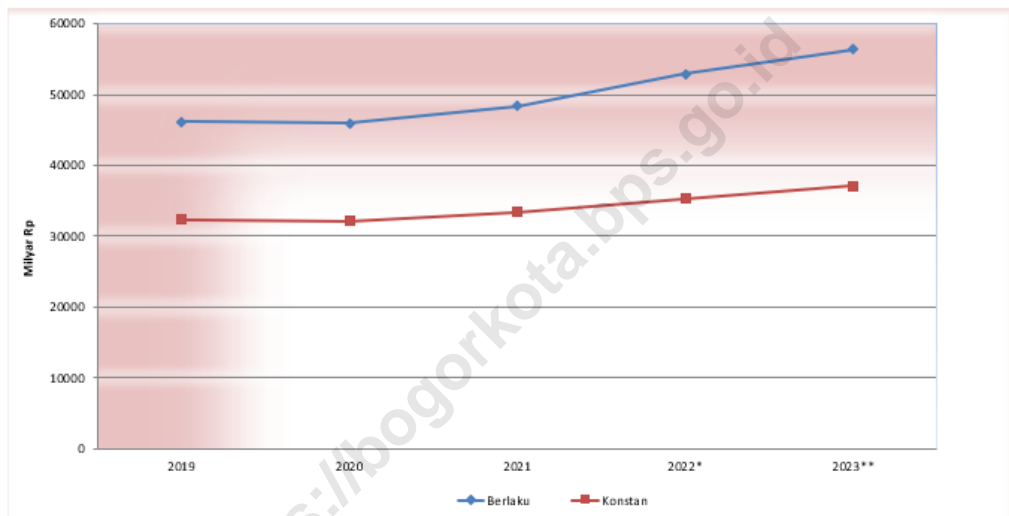


Distribusi PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut komponen pengeluarannya selama 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 2. Selama lima tahun berturut-turut komponen Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Pengeluaran Kota Bogor. Nilai net ekspor impor memberikan kontribusi negatif, hal ini dikarenakan besarnya nilai impor dibandingkan nilai ekspor.

Dari Gambar 3, dapat dilihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB Atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada PDRB Atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga

tersebut telah ditiadakan, karena harga yang digunakan adalah harga pada tahun 2010. Sama halnya PDRB Atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB Atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Gambar 3 Perbandingan PDRB Kota Bogor Atas dasar harga berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, 2019-2023



Pada tahun 2021-2023 nilai PDRB Atas dasar harga berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan adanya peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan volume yang menyebabkan pertumbuhan nilai PDRB pada tahun 2021-2023. Kondisi perekonomian di Kota Bogor pada tahun 2020 tidak mengalami peningkatan, dikarenakan sektor ekonomi lumpuh akibat pandemi Covid-19. Hal ini terjadi bukan hanya untuk wilayah Kota Bogor, namun terjadi untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2021 dan 2022 berbagai program pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19 diselenggarakan oleh pemerintah yang kemudian dapat mendorong peningkatan perekonomian agar dapat kembali pada kondisi normal.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Tabel 3 Distribusi PDRB Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	98,67	98,04	97,88	98,67	98,87
2 Konsumsi LNPRT	1,71	1,67	1,63	1,63	1,68
3 Konsumsi Pemerintah	10,76	10,79	10,23	9,44	9,69
4 PMTB	34,03	31,81	34,01	32,96	34,63
5 Perubahan Inventori	4,62	1,86	-1,10	-0,03	0,01
6 Net (Ekspor Impor)	(49,80)	(44,17)	(42,66)	(42,67)	(44,88)
TOTAL PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

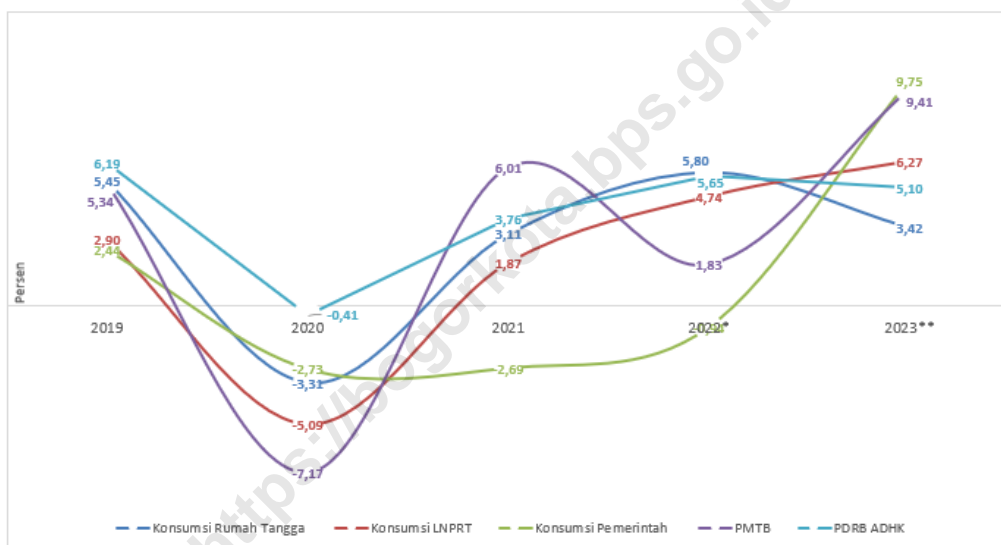
** Angka sangat sementara

Tabel 3 menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023, sebagian besar PDRB Kota Bogor digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yaitu di atas 30 persen. Komponen net ekspor menunjukkan angka negatif, artinya selama 2019-2023 nilai impor masih lebih besar dibandingkan nilai ekspor di Kota Bogor. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah.

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada level 9,69 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap

PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2019-2023 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor atau sering disebut *net import*, menunjukkan nilai negatif yang mengindikasikan nilai impor barang dan jasa yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor.

Gambar 4 Pertumbuhan PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bogor, 2019-2023



Gambar menunjukkan pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun 2019-2023. Selama periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi Kota Bogor cukup fluktuatif. Selama lima tahun terakhir, PDRB Kota Bogor mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan sebesar 6,19 persen. Dikarenakan pandemi Covid-19 PDRB, pada tahun 2020 PDRB Kota Bogor mengalami kontraksi sebesar 0,41 persen, begitu juga dengan seluruh komponennya penyusunnya. Seiring dengan diadakannya program pemulihan ekonomi, PDRB Kota Bogor tumbuh positif kembali pada 2021 pada level 3,76 persen. Perekonomian Kota Bogor terus menguat pada tahun 2022 dan 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,65 dan 5,10 persen. Komponen PDRB yang mengalami pertumbuhan

tertinggi pada tahun 2023 adalah komponen konsumsi pemerintah dengan pertumbuhan mencapai 9,75 persen.

Tabel 4 Indeks Implisit PDRB Kota Bogor Menurut Pengeluaran, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Konsumsi Rumah Tangga	148,23	151,39	154,28	160,96	168,01
2 Konsumsi LNPRT	135,73	138,40	140,05	145,92	152,82
3 Konsumsi Pemerintah	156,29	160,02	164,17	167,50	168,63
4 PMTB	139,23	139,32	147,89	154,13	159,43
5 Perubahan Inventori	164,28	164,69	176,13	176,91	183,90
6 Net (Ekspor Impor)	155,32	165,95	176,57	187,24	200,23
TOTAL PDRB	143,05	142,75	144,81	150,07	153,83

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi, maupun ekspor dan impor. Tabel 4 menunjukkan tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2019-2023, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen. Seluruh komponen mengalami peningkatan harga pada rentang tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 komponen net ekspor-impor mengalami peningkatan harga tertinggi sebesar 12,99 poin, sedangkan komponen konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan tertinggi kedua yaitu sebesar 7,05 poin. Konsumsi pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja bansos, dan *social transfer*; mengalami

⁶ Indeks perkembangan

peningkatan yang paling kecil jika dibandingkan dengan komponen lainnya, yaitu sebesar 1,13 poin.

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kota Bogor untuk periode 2019-2023.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 5 Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Bogor, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	45.582,47	45.013,83	47.301,11	52.212,39	56.362,06
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	30.750,83	29.733,52	30.659,69	32.438,61	33.546,74
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	98,67	98,04	97,88	98,67	98,87
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	41.838,36	43.258,99	45.009,24	49.213,56	52.639,45
b. ADHK 2010	28.224,98	28.574,37	29.174,15	30.575,50	31.331,04
Pertumbuhan (%)					
a. Total konsumsi RT	5,45	-3,31	3,11	5,80	3,42
b. Perkapita	6,16	1,24	2,10	4,80	2,47
Jumlah penduduk (ribu org)	1.089,49	1.040,57	1.050,92	1.060,94	1.070,72

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa. Tabel 5 menunjukkan Kontribusi Konsumsi Akhir Rumah Tangga yang sangat tinggi (lebih dari 90 persen) pada tahun 2019-2023. Dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Bogor, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kota Bogor maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

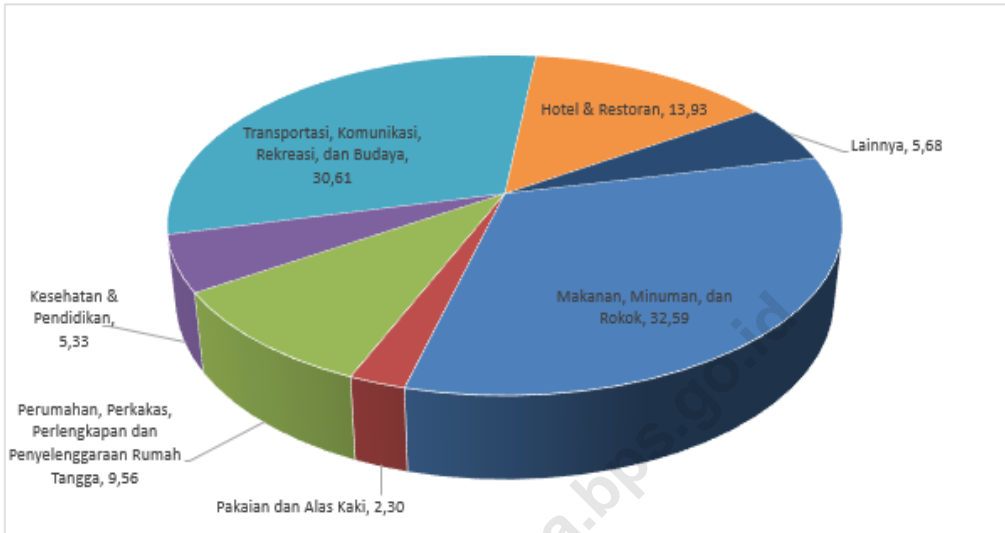
Tabel 5 menunjukkan bahwa pada periode tahun 2019-2023, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga hampir selalu mengalami peningkatan signifikan baik dari sisi nominal (Atas dasar harga berlaku) maupun secara riil

(Atas Dasar Harga Konstan), kecuali pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kenaikkan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kenaikan rata-rata konsumsi per kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik Atas dasar harga berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi pada tahun 2019 per-kapita meningkat 6,16 persen. Meskipun pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi Covid-19, namun pertumbuhan konsumsi perkapita tetap mengalami peningkatan sebesar 1,19 persen. Peningkatan konsumsi perkapita yang tidak diiringi dengan peningkatan total konsumsi rumah tangga menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 yang disebabkan pandemi Covid-19.

Pada masa pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga. Kondisi ini ditunjukkan dengan pertumbuhan yang mulai meningkat pada tahun 2021 dan 2022 sebesar 3,11 dan 5,80 persen. Sudah mulai stabilnya komponen konsumsi akhir rumah tangga ditunjukkan dengan pertumbuhan komponen konsumsi akhir rumah tangga yang bernilai positif sebesar 3,42 persen.

Gambar 5 Struktur Komponen Konsumsi Rumah Tangga Kota Bogor, 2023



Gambar 6 menunjukkan komposisi pengeluaran rumah tangga terbesar menurut kelompok konsumsinya adalah pengeluaran makanan, minuman dan rokok mencapai 32,59 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Kelompok konsumsi terbesar kedua adalah pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya mencapai 30,61 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Kelompok pengeluaran rumah tangga terkecil pada tahun 2023 adalah konsumsi untuk pakaian dan alas kaki dengan nilai 2,30 persen.

Tabel 6 menunjukkan pada 5 tahun terakhir tidak terdapat perubahan terhadap struktur komponen konsumsi rumah tangga. Hal ini terjadi pada kondisi normal maupun saat krisis akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 diaat pandemi Covid-19, komponen konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya mengalami penurunan dibawah 30 persen. Pada saat pandemi Covid-19 pengeluaran untuk komponen konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya dialihkan untuk kelompok konsumsi makanan, minuman, dan rokok yang mengalami peningkatan cukup tinggi.

Tabel 6 Struktur Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Bogor, 2019-2023 (persen)

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	31,93	33,54	33,52	33,05	32,59
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,63	2,50	2,43	2,37	2,30
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,86	10,12	9,74	9,66	9,56
d. Kesehatan & Pendidikan	4,61	4,88	5,25	5,33	5,33
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	31,92	29,95	30,28	30,29	30,61
f. Hotel & Restoran	13,61	13,48	13,24	13,66	13,93
g. Lainnya	5,44	5,53	5,55	5,63	5,68
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 7 menunjukkan peningkatan harga secara implisit pada tahun 2019-2023 untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hampir semua kelompok konsumsi mengalami pertumbuhan harga secara implisit positif pada lima tahun terakhir. Kelompok kesehatan dan pendidikan; serta kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2021. Mulai meredanya pandemi Covid-19, menyebabkan didorongnya kembali sektor transportasi, rekreasi, dan budaya dengan adanya penurunan harga.

Tabel 7 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Bogor, 2019-2023 (persen)

Kelompok Konsumsi	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,59	1,71	5,00	4,41	8,36
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,45	3,15	1,20	1,59	3,37
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,21	1,14	1,01	5,35	2,79
d. Kesehatan & Pendidikan	6,08	3,33	-1,05	3,98	1,43
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,02	0,76	-0,62	4,93	2,26
f. Hotel & Restoran	3,00	2,33	0,81	1,87	1,26
g. Lainnya	4,37	6,08	1,10	7,83	3,26

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 8 menunjukkan total pengeluaran konsumsi LNPRT baik Atas dasar harga berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2019 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan meningkat lagi pada kurun waktu 2021-2023. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT sebesar 790,72 miliar rupiah, kemudian pada tahun-tahun berikutnya yaitu 765,21 miliar rupiah (2020); 788,75 miliar rupiah (2021), 860,78 miliar

rupiah (2022), dan 958,04 miliar rupiah (2023). Pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT tahun dasar 2010 tergolong fluktuatif, penurunan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar -5,09 persen dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 6,27 persen dikarenakan pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, sehingga pengeluaran lembaga nonprofit yang bergerak di bidang politik mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Tabel 8 Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kota Bogor, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	790,72	765,21	788,75	860,78	958,04
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	582,55	552,89	563,21	589,91	626,92
Proporsi terhadap PDRB (ADHB) (%)	1,71	1,67	1,63	1,63	1,68
Pertumbuhan (ADHK 2010) (%)	2,90	-5,09	1,87	4,74	6,27

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah, b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga) dan c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan

jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri: a) *Nonrivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut, b) *Nonexcludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 9 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Bogor, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	4.972,04	4.952,12	4.943,91	4.996,68	5.521,01
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.181,39	3.094,63	3.011,38	2.983,11	3.274,02
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	10,76	10,79	10,23	9,44	9,69
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	4.563,64	4.759,06	4.704,36	4.709,69	5.156,36
b. ADHK 2010	2.920,07	2.973,98	2.865,47	2.811,77	3.057,77
Pertumbuhan[%]					
a. Total konsumsi pemerintah	2,44	-2,73	-2,69	-0,94	9,75
b. Konsumsi perkapita	3,13	1,85	-3,65	-1,87	8,75
Jumlah penduduk (000 org)	1.089,49	1.040,57	1.050,92	1.060,94	1.070,72

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 9 menunjukkan secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik Atas dasar harga berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4.972,04 miliar rupiah (2019), 4.952,12 miliar rupiah (2020); 4.943,91 miliar rupiah (2021); 4.996,68 miliar rupiah (2022), dan 5.521,01 miliar rupiah (2023). Pada tahun 2022, konsumsi pemerintah atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan, namun berdasar harga konstan justru menurun, hal ini menunjukkan bahwa volume konsumsi pemerintah mengalami penurunan.

Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah Atas Dasar Harga Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun kecuali tahun 2020-2022. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi perubahan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah paling tinggi terjadi pada tahun 2023. Hal ini disebabkan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Kota Bogor, seperti pembangunan taman-taman kota, Lapangan Sempur, pembangunan Jembatan Otista, pembangunan Masjid Agung, dan berbagai infrastruktur lain. Penurunan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah selama 2020-2022 dipengaruhi oleh dampak Covid-19 yang mengharuskan berbagai penghematan anggaran pemerintah pada program-program non prioritas dan mengalihkannya pada program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan

untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” ini menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas pengeluaran sumber daya finansial oleh pemerintah. Kontribusi konsumsi akhir pemerintahan terhadap PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 10,79 persen. Pengeluaran konsumsi pemerintah yang besar dapat menjadi katalisator proses pembangunan di suatu wilayah, sehingga memiliki *multiplier effect* yang cukup besar bagi masyarakat umum maupun pegawai negeri.

3.2.4. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Investasi memiliki peranan yang penting dalam pertumbuhan jangka pendek dan juga jangka panjang. Adanya perkembangan fisik di Kota Bogor pada tahun 2023 ditunjukkan dengan informasi belanja modal berupa

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

pembangunan infrastruktur dan belanja modal non bangunan yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi. Sedangkan informasi pendukung dapat diperoleh dari data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta fenomena pembangunan yang ada di Kota Bogor.

Dari *website* Pemerintah Kota Bogor, total realisasi inventasi pada tahun 2023 mencapai 1,9 triliun rupiah. Realisasi investasi terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan selama dua tahun terakhir yaitu tahun 2022 dan tahun 2023. Tingginya nilai investasi di Kota Bogor didukung dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bogor, yaitu pembangunan Jembatan Otista, pembangunan Masjid Agung, pembangunan GOR, pembangunan pasar bersih, serta perbaikan taman-taman kota.

Tabel 10 menunjukkan bahwa aktivitas investasi fisik di Kota Bogor pada tahun 2021 hingga tahun 2023 cenderung selalu mengalami perkembangan positif. Tercatat nilai PMTB Atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 15.722,78 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 nilai PMTB mengalami penurunan baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Penurunan tersebut disebabkan para pelaku ekonomi yang mengalihkan investasi fisiknya ke dalam sektor kesehatan dan sektor lainnya untuk mengatasi adanya pandemi Covid-19.

Tabel 10 Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Bogor, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	15.722,78	14.605,10	16.435,04	17.441,68	19.739,33
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	11.293,06	10.482,87	11.113,12	11.316,17	12.381,00
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	34,03	31,81	34,01	32,96	34,63

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada tahun 2021 nilai PMTB Atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 sebesar 1.829,94 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2020 menjadi 16.435,04 miliar rupiah. Nilai PMTB Atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan hingga menjadi 17.441,68 miliar rupiah dan 19.739,33 miliar rupiah.

3.2.5. Perkembangan Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis dengan rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi kontribusinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Tabel 11 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Bogor, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	2.135,03	855,79	-529,40	-18,40	7,44
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	1.299,59	519,63	-300,58	-10,40	4,05
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	4,62	1,86	-1,10	-0,03	0,01

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada tahun 2019 perubahan inventori Atas dasar harga berlaku mencapai 2.135,03 miliar rupiah, menurun drastis pada 2020 menjadi 855,79 miliar rupiah. Tahun 2021 angka inventori kembali mengalami penurunan hingga menjadi bernilai negatif 529,40 miliar rupiah. Perubahan inventori mulai meningkat pada tahun 2022 dengan nilai -18,40 miliar rupiah. Pada tahun 2023 perubahan inventori Atas dasar harga berlaku bernilai positif mencapai 7,44 miliar rupiah. Sementara itu, Kontribusi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kota Bogor mengalami peningkatan menjadi 0.01 persen dari total PDRB pada tahun 2023.

3.2.6. Perkembangan Net Ekspor/Impor

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Bogor, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Sebaliknya, transaksi impor adalah barang dan jasa yang dikonsumsi di wilayah ekonomi Kota Bogor tetapi dihasilkan dari luar wilayah Kota Bogor. Dilihat dari komposisinya net ekspor Kota Bogor bernilai negatif, artinya konsumsi impor lebih banyak dibanding daripada ekspor yang dihasilkan.

Secara total, dalam kurun waktu 2019-2023 laju pertumbuhan net ekspor Kota Bogor sangat berfluktuatif. Net ekspor-impor dengan nilai negatif menunjukkan besarnya komposisi impor dibandingkan ekspor di Kota Bogor menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan perekonomian, baik untuk memenuhi produksi dan konsumsi, dipenuhi oleh barang-barang impor dari luar Kota Bogor. Impor ini dapat berasal dari domestik, yaitu produk yang berasal dari wilayah lain dalam negeri dan juga produk dari luar negeri.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPR, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kota Bogor. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari nonresiden. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kota Bogor di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor barang dan jasa dapat

menunjukkan seberapa besar ketergantungan Kota Bogor terhadap ekonomi atau produk wilayah lain, baik wilayah Kota Bogor lain dalam satu provinsi, provinsi lain, maupun luar negeri.

Tabel 12 Perkembangan Net Ekspor Impor Kota Bogor, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor Impor					
a. ADHB (Miliar Rp)	-23.005,29	-20.280,18	-20.613,76	-22.578,53	-25.584,13
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-14.811,69	-12.220,79	-11.674,35	-12.058,53	-12.777,35
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	-49,80	-44,17	-42,66	-42,67	-44,88

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 12 menunjukkan kondisi perkembangan net ekspor dan impor di Kota Bogor pada tahun 2019 hingga tahun 2023. Secara umum nilai Net ekspor impor atas dasar harga berlaku terus meningkat namun dengan arah negatif, yang disebabkan karena meningkatnya konsumsi berbagai pelaku ekonomi dengan barang dan jasa yang berasal dari luar wilayah maupun luar negeri. Pada tahun 2023 nilai net ekspor impor Atas dasar harga berlaku mencapai nilai -25.584,13 triliun rupiah dengan kontribusi terhadap total PDRB Pengeluaran sebesar -44,88 persen.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KOTA
BOGOR MENURUT PENGELUARAN
2019-2023

<https://bogorkota.bps.go.id>

<https://bogorkota.bps.go.id>

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) untuk melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat PDRB Pengeluaran menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kota Bogor yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan (konsep bruto). PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, adalah PDRB perkapita. PDRB per kapita memberikan gambaran rata-rata kemampuan setiap penduduk Kota Bogor dalam memberikan nilai tambah bruto. Tabel 13 memberikan gambaran perubahan PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan, serta perkembangan nilai per kapita dan laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir.

PDRB Kota Bogor per kapita pada tahun 2019 mencapai 42.403 ribu rupiah, dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dengan nilai PDRB per kapita mencapai 53.239 ribu rupiah. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kota Bogor juga senantiasa mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2019 dan 2020 ketika terjadi pandemi Covid-19. Nilai PDRB per kapita adalah nilai yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga berlaku yang dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga nilainya akan sangat dipengaruhi oleh kenaikan volume produksi, kenaikan harga, dan pertumbuhan jumlah penduduk.

Tabel 13 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Bogor, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	46.198	45.912	48.326	52.915	57.004
- ADHK 2010	32.296	32.163	33.372	35.259	37.055
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	42.403	44.122	45.984	49.875	53.239
- ADHK 2010	29.643	30.909	31.755	33.234	34.608
Pertumbuhan PDRB					
perkapita ADHK 2010 (%)	6,90	4,27	2,74	4,66	4,13
Jumlah penduduk (<i>000 org</i>)	1.089	1.041	1.051	1.061	1.071
Pertumbuhan (%)	-0,67	-4,49	1,00	0,95	0,92

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Kinerja ekonomi dari suatu wilayah diukur dengan menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB per kapita secara riil yang diukur dengan menggunakan harga konstan juga mengalami peningkatan sela lima tahun terakhir. Kondisi berbeda terjadi pada 2020 yaitu kenaikan PDRB per kapita tetap terjadi saat ekonomi terkonstraksi lebih karena faktor penurunan jumlah penduduk di Kota Bogor sebesar -0.67 persen pada tahun 2019 dan -4,49 persen pada tahun 2020. Penurunan ini diakibatkan banyaknya penduduk migran yang Kembali ke daerah asal selama pandemi Covid-19 karena banyak aktivitas ekonomi, sosial, dan pendidikan dilakukan secara daring. Pada tahun 2021, PDRB perkapita atas dasar harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2,74 persen, diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen menunjukkan pemulihan ekonomi yang sedang menggeliat di Kota Bogor. Tahun 2022 dan 2023 PDRB per kapita

tumbuh sebesar 4,66 persen dan 4,13 persen menunjukkan semakin stabil dan membaiknya kondisi perekonomian Kota Bogor.

Secara umum maka pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara riil tetapi juga terjadi secara kualitas. Tujuan utama yang harus dicapai bukan hanya sekedar peningkatan nilai PDRB per kapita tetapi pemerataan pendapatan dengan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat. Peningkatan PDRB perkapita yang senantiasa meningkat, diharapkan dapat didukung oleh program-program pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat dengan ekonomi yang masih rendah.

4.2 KONTRIBUSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir baik berasal dari produk domestik maupun impor untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Pengeluaran untuk penambahan asset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga tidak termasuk dalam konsumsi akhir, karena pengeluaran dengan tersebut termasuk dalam komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Tabel 14 menunjukkan gambaran Kontribusi total konsumsi akhir yang dilakukan rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah terhadap total PDRB Kota Bogor selama tahun 2019-2023. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir porsi pengeluaran konsumsi akhir terhadap PDRB Kota Bogor mencapai 110,27 persen, yang berarti bahwa penggunaan konsumsi akhir melebihi total nilai PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi lebih dominan bergerak pada ketiga komponen tersebut. Kontribusi tertinggi terjadi di tahun

2019 sesaat sebelum pandemi Covid-19 terjadi dan mengalami penurunan hingga tahun 2022. Pada tahun 2023 Kontribusi konsumsi akhir meningkat dan mencapai 110,24 persen menunjukkan bahwa pola konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah sudah kembali meningkat dan mendekati Kontribusi sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Tabel 14 Kontribusi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Bogor, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	45.582,47	45.013,83	47.301,11	52.212,39	56.362,06
b. LNPRT	790,72	765,21	788,75	860,78	958,04
c. Pemerintah	4.972,04	4.952,12	4.943,91	4.996,68	5.521,01
Jumlah	51.345,23	50.731,16	53.033,77	58.069,85	62.841,11
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	46.197,76	45.911,86	48.325,64	52.914,60	57.003,76
Proporsi	111,14	110,50	109,74	109,74	110,24

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 15 Incremental Capital Output Ratio Kota Bogor, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	32.295,73	32.162,74	33.372,48	35.258,87	37.055,36
Perubahan (miliar rupiah)	1.882,15	(132,99)	1.209,73	1.886,39	1.796,49
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp)	11.293,06	10.482,87	11.113,12	11.316,17	12.381,00
ICOR	6,00	(78,83)	9,19	6,00	6,89

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Angka ICOR menunjukkan besarnya input yang dibutuhkan untuk meningkatkan setiap 1 unit output. Tabel 15 menunjukkan nilai ICOR Kota Bogor pada tahun 2019-2023. ICOR Kota Bogor pada tahun 2020 bernilai negatif dengan nilai -78,83 yang disebabkan menurunnya jumlah output dibandingkan periode sebelumnya, sebagai akibat pandemi Covid-19 yang menurunkan hampir seluruh sektor produksi. Penurunan ini bukan disebabkan karena berkurangnya kapital yang terlibat dalam kegiatan

ekonomi, namun lebih disebabkan karena adanya kebijakan pembatasan dalam kegiatan produksi yang menurunkan kapasitas produksinya.

Semakin efisien suatu perekonomian maka semakin rendah nilai ICOR-nya, yang berarti semakin sedikit penambahan kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output. Pada tahun 2021 nilai ICOR Kota Bogor mengalami peningkatan kembali yang relatif tinggi mencapai 9,19. Pada tahun 2022 nilai ICOR Kota Bogor turun sebesar 3,19 poin menjadi 6,00 persen sama besarnya jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Tahun 2023 nilai ICOR Kota Bogor kembali meningkat 0,89 poin menjadi sebesar 6,89. Adanya penurunan nilai ICOR menunjukkan bahwa investasi yang ada di suatu wilayah semakin efisien dan begitu juga sebaliknya. Melihat nilai ICOR Kota Bogor yang mengalami peningkatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari investasi di Kota Bogor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

<https://bogorkota.bps.go.id>

BAB V PENUTUP

<https://bogorkota.bps.go.id>

<https://bogorkota.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2019-2023 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Bogor pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2019 hingga 2023, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan

disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

5. Penyajian publikasi PDRB Menurut Pengeluaran tahun 2019-2023 menggunakan data pendukung berupa literatur, data sekunder dari berbagai institusi terkait serta fenomena ekonomi dan sosial dalam lingkup regional, nasional, dan global yang relevan dengan data dan informasi yang disajikan.
6. Penyajian publikasi PDRB Pengeluaran pada tahun 2023 menitikberatkan pemulihan ekonomi seiring peningkatan mobilitas masyarakat pasca pandemi covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Bogor pada tahun 2023 secara keseluruhan 5,10 persen melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,65 persen. Menurut komponen pengeluaran, kinerja positif didorong oleh komponen PKRT, PKP, PKRT, dan PMTB yang mengalami pertumbuhan.

LAMPIRAN

<https://bogorkota.bps.go.id>

<https://bogorkota.bps.go.id>

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	45.582.471,86	45.013.833,61	47.301.106,66	52.212.386,19	56.362.061,23
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	16.158.400,10	16.689.948,68	18.060.975,01	19.674.312,19	21.739.596,28
b. Pakaian dan Alas Kaki	1.099.756,70	1.042.519,47	1.058.557,54	1.109.806,24	1.152.785,18
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.309.538,90	4.328.031,71	4.335.556,56	4.793.472,61	5.046.030,18
d. Kesehatan & Pendidikan	2.050.236,79	2.169.526,03	2.379.833,86	2.657.091,54	2.787.798,94
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	13.508.255,25	12.346.683,02	12.789.860,23	14.206.881,10	15.179.452,66
f. Hotel & Restoran	6.070.402,95	5.949.127,82	6.075.844,24	6.756.990,64	7.211.501,64
g. Lainnya	2.385.881,17	2.487.996,88	2.600.479,22	3.013.831,87	3.244.896,34
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	790.720,57	765.207,43	788.753,56	860.783,64	958.041,54
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.972.035,60	4.952.118,36	4.943.910,44	4.996.676,26	5.521.008,61
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	15.722.784,25	14.605.097,61	16.435.042,29	17.441.678,60	19.739.333,88
5 Perubahan Inventori	2.135.031,83	855.786,02	-529.404,91	-18.399,42	7.439,56
6 Net Expor	-23.005.286,99	-20.280.178,90	-20.613.763,43	-22.578.526,83	-25.584.126,92
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	46.197.757,12	45.911.864,14	48.325.644,61	52.914.598,44	57.003.757,90

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	30.750.830,01	29.733.515,63	30.659.693,12	32.438.614,22	33.546.735,66
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	9.819.194,50	9.971.413,24	10.277.137,15	10.722.428,93	10.933.836,43
b. Pakaian dan Alas Kaki	807.360,80	741.994,02	744.503,18	768.326,56	772.029,80
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3.031.672,10	3.010.465,58	2.985.404,52	3.133.122,28	3.208.691,16
d. Kesehatan & Pendidikan	1.417.638,50	1.451.824,51	1.609.471,28	1.728.158,15	1.787.560,49
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9.817.008,10	8.905.346,82	9.282.721,86	9.826.814,39	10.267.425,33
f. Hotel & Restoran	4.184.995,00	4.007.950,79	4.060.249,33	4.432.335,03	4.671.797,25
g. Lainnya	1.672.961,01	1.644.520,67	1.700.205,80	1.827.428,88	1.905.395,21
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	582.554,14	552.891,24	563.206,14	589.913,95	626.922,14
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.181.385,97	3.094.626,38	3.011.379,65	2.983.107,94	3.274.015,96
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.293.055,66	10.482.867,58	11.113.119,59	11.316.167,41	12.380.995,94
5 Perubahan Inventori	1.299.593,61	519.632,39	-300.576,52	-10.400,64	4.045,53
6 Net (Expor Impor)	-14.811.689,98	-12.220.790,87	-11.674.345,54	-12.058.532,86	-12.777.352,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	32.295.729,41	32.162.742,35	33.372.476,44	35.258.870,02	37.055.362,80

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	98,67	98,04	97,88	98,67	98,87
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	34,98	36,35	37,37	37,18	38,14
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,38	2,27	2,19	2,10	2,02
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,33	9,43	8,97	9,06	8,85
d. Kesehatan & Pendidikan	4,44	4,73	4,92	5,02	4,89
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	29,24	26,89	26,47	26,85	26,63
f. Hotel & Restoran	13,14	12,96	12,57	12,77	12,65
g. Lainnya	5,16	5,42	5,38	5,70	5,69
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,71	1,67	1,63	1,63	1,68
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,76	10,79	10,23	9,44	9,69
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,03	31,81	34,01	32,96	34,63
5 Perubahan Inventori	4,62	1,86	-1,10	-0,03	0,01
6 Net (Expor Impor)	-49,80	-44,17	-42,66	-42,67	-44,88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	95,22	92,45	91,87	92,00	90,53
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	30,40	31,00	30,80	30,41	29,51
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,50	2,31	2,23	2,18	2,08
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,39	9,36	8,95	8,89	8,66
d. Kesehatan & Pendidikan	4,39	4,51	4,82	4,90	4,82
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	30,40	27,69	27,82	27,87	27,71
f. Hotel & Restoran	12,96	12,46	12,17	12,57	12,61
g. Lainnya	5,18	5,11	5,09	5,18	5,14
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,80	1,72	1,69	1,67	1,69
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,85	9,62	9,02	8,46	8,84
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	34,97	32,59	33,30	32,09	33,41
5 Perubahan Inventori	4,02	1,62	-0,90	-0,03	0,01
6 Net (Expor Impor)	-45,86	-38,00	-34,98	-34,20	-34,48
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	8,77	-1,25	5,08	10,38	7,95
a. Makanan, Minuman, dan	10,63	3,29	8,21	8,93	10,50
b. Pakaian dan Alas Kaki	8,00	-5,20	1,54	4,84	3,87
c. Perumahan, Perkakas,					
d. Perlengkapan dan	4,21	0,43	0,17	10,56	5,27
e. Penyelenggaraan Rumah					
f. Kesehatan & Pendidikan	10,42	5,82	9,69	11,65	4,92
g. Transportasi, Komunikasi,					
h. Rekreasi, dan Budaya	7,09	-8,60	3,59	11,08	6,85
i. Hotel & Restoran	9,90	-2,00	2,13	11,21	6,73
j. Lainnya	10,84	4,28	4,52	15,90	7,67
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	5,03	-3,23	3,08	9,13	11,30
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,43	-0,40	-0,17	1,07	10,49
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,04	-7,11	12,53	6,12	13,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9,32	-0,62	5,26	9,50	7,73

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	5,45	-3,31	3,11	5,80	3,42
a. Makanan, Minuman, dan	6,79	1,55	3,07	4,33	1,97
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,40	-8,10	0,34	3,20	0,48
Perumahan, Perkakas,					
c. Perlengkapan dan	1,95	-0,70	-0,83	4,95	2,41
Penyelenggaraan Rumah					
Tangga					
d. Kesehatan & Pendidikan	4,09	2,41	10,86	7,37	3,44
e. Transportasi, Komunikasi,	4,97	-9,29	4,24	5,86	4,48
Rekreasi, dan Budaya					
f. Hotel & Restoran	6,70	-4,23	1,30	9,16	5,40
g. Lainnya	6,20	-1,70	3,39	7,48	4,27
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,90	-5,09	1,87	4,74	6,27
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,44	-2,73	-2,69	-0,94	9,75
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,34	-7,17	6,01	1,83	9,41
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,19	-0,41	3,76	5,65	5,10

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas dasar harga berlaku Menurut Pengeluaran, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	248,33	245,24	257,70	284,45	307,06
a. Makanan, Minuman, dan	312,12	322,38	348,87	380,03	419,92
b. Pakaian dan Alas Kaki	220,20	208,74	211,95	222,21	230,82
Perumahan, Perkakas,					
c. Perlengkapan dan	188,48	189,29	189,62	209,64	220,69
Penyelenggaraan Rumah					
Tangga					
d. Kesehatan & Pendidikan	222,68	235,64	258,48	288,59	302,79
e. Transportasi, Komunikasi,	233,15	213,10	220,75	245,21	262,00
Rekreasi, dan Budaya					
f. Hotel & Restoran	225,28	220,78	225,48	250,76	267,63
g. Lainnya	242,63	253,02	264,46	306,49	329,99
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	217,30	210,29	216,76	236,55	263,28
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	211,12	210,28	209,93	212,17	234,43
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	275,81	256,21	288,31	305,97	346,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	246,05	244,53	257,39	281,83	303,61

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	167,53	161,99	167,03	176,73	182,76
a. Makanan, Minuman, dan	189,67	192,61	198,51	207,12	211,20
b. Pakaian dan Alas Kaki	161,65	148,57	149,07	153,84	154,58
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	132,59	131,66	130,57	137,03	140,33
d. Kesehatan & Pendidikan	153,97	157,68	174,81	187,70	194,15
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	169,44	153,71	160,22	169,61	177,21
f. Hotel & Restoran	155,31	148,74	150,68	164,49	173,38
g. Lainnya	170,13	167,24	172,90	185,84	193,77
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	160,09	151,94	154,78	162,12	172,29
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	135,09	131,40	127,87	126,67	139,02
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	198,10	183,89	194,95	198,51	217,19
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	172,01	171,30	177,74	187,79	197,36

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 9. Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor (2010=100) Menurut Pengeluaran, 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	148,23	151,39	154,28	160,96	168,01
a. Makanan, Minuman, dan	164,56	167,38	175,74	183,49	198,83
b. Pakaian dan Alas Kaki Perumahan, Perkakas,	136,22	140,50	142,18	144,44	149,32
c. Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	142,15	143,77	145,23	152,99	157,26
d. Kesehatan & Pendidikan	144,62	149,43	147,86	153,75	155,96
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	137,60	138,64	137,78	144,57	147,84
f. Hotel & Restoran	145,05	148,43	149,64	152,45	154,36
g. Lainnya	142,61	151,29	152,95	164,92	170,30
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	135,73	138,40	140,05	145,92	152,82
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	156,29	160,02	164,17	167,50	168,63
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	139,23	139,32	147,89	154,13	159,43
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	143,05	142,75	144,81	150,07	153,83

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kota Bogor (2010=100) Menurut Pengeluaran, 2019- 2023 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	3,15	2,13	1,91	4,33	4,38
a. Makanan, Minuman, dan	3,59	1,71	5,00	4,41	8,36
b. Pakaian dan Alas Kaki	4,45	3,15	1,20	1,59	3,37
c. Perlengkapan dan	2,21	1,14	1,01	5,35	2,79
d. Kesehatan & Pendidikan	6,08	3,33	-1,05	3,98	1,43
e. Transportasi, Komunikasi,	2,02	0,76	-0,62	4,93	2,26
f. Hotel & Restoran	3,00	2,33	0,81	1,87	1,26
g. Lainnya	4,37	6,08	1,10	7,83	3,26
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	2,07	1,97	1,19	4,19	4,73
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,97	2,39	2,59	2,03	0,68
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,57	0,07	6,15	4,22	3,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	2,94	-0,21	1,44	3,64	2,51

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BOGOR**
BPS-Statistik of Bogor Municipality

Jl. Layungsari III No. 13 Bogor 16132
Bogor - Jawa Barat
Telp. +62 251 8324579
Fax. +62 251 8327641, Email: bps3271@bps.go.id